JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 25/07/2026; Revised: 01/08/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

Analisis Tata Naskah Dinas dan Kebijakan Kebahasaan dalam Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Daerah

Ratna Sari Dewi[1)], Boby Indra Prayoga[2)], Nurul Dalimunte[3)]

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), Medan, Indonesia

ratnaharahap46@gmail.com[1)]
bobyindraprayoga17@gmail.com[2)]
nuruldalimunthe009@gmail.com[3)]

Abstrak

Tata naskah dinas dan penggunaan bahasa Indonesia baku merupakan elemen penting dalam mendukung kualitas administrasi pemerintahan daerah karena berperan dalam mewujudkan komunikasi birokrasi yang efektif, akuntabel, dan profesional. Meskipun berbagai regulasi mengenai tata naskah dinas dan kaidah kebahasaan telah diterbitkan, implementasinya di lingkungan pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata naskah dinas dan kebijakan kebahasaan dalam meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan daerah, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan bahasa Indonesia baku, serta menjelaskan implikasinya terhadap efektivitas administrasi publik. Penelitian menggunakan metode studi literatur (*literature review*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari artikel ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, pedoman tata naskah dinas, dan dokumen resmi yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil kajian menunjukkan bahwa kualitas tata naskah dinas dipengaruhi oleh kompetensi kebahasaan aparatur, pemahaman terhadap regulasi, pelatihan, mekanisme penyuntingan dokumen, budaya organisasi, dan dukungan teknologi informasi. Penerapan bahasa Indonesia baku secara konsisten terbukti mendukung efektivitas komunikasi birokrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat kualitas tata kelola administrasi pemerintahan daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan mengintegrasikan perspektif kebahasaan dan administrasi publik dalam kajian tata naskah dinas. Secara praktis, hasil penelitian merekomendasikan penguatan pembinaan kebahasaan, pelaksanaan pelatihan penulisan naskah dinas secara berkelanjutan, serta pengembangan mekanisme penyuntingan dokumen sebagai strategi peningkatan kualitas administrasi pemerintahan daerah.

Kata kunci: Tata Naskah Dinas, Kebijakan Kebahasaan, Bahasa Indonesia Baku, Administrasi Pemerintahan Daerah, Administrasi Publik

Abstract

Official document administration and the use of standard Indonesian are essential components in improving the quality of local government administration, as they support effective, accountable, and professional bureaucratic communication. Although various regulations concerning official document administration and linguistic standards have been established, their implementation within local government institutions continues to face significant challenges. This study aims to analyze official document administration and language policy in enhancing the quality of local government administration, identify the factors influencing the implementation of standard Indonesian, and examine their implications for the effectiveness of public administration. The study employed a qualitative descriptive approach using a literature review method. Data were collected from scholarly

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 25/07/2026; Revised: 01/08/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

journal articles, books, statutory regulations, official document administration guidelines, and other relevant official publications, and were analyzed using content analysis. The findings indicate that the quality of official document administration is influenced by the linguistic competence of government officials, understanding of regulatory frameworks, professional training, document editing mechanisms, organizational culture, and the support of information technology. The consistent application of standard Indonesian contributes to more effective bureaucratic communication, strengthens transparency and accountability, and enhances the overall quality of local government governance. This study contributes theoretically by integrating linguistic and public administration perspectives in the analysis of official document administration. Practically, the findings recommend strengthening language development programs, providing continuous training in official document writing, and establishing systematic document editing mechanisms as strategic efforts to improve the quality of local government administration.

Key words: *Official Document Administration, Language Policy, Standard Indonesian, Local Government Administration, Public Administration*

PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan administrasi negara (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025). Dalam konteks administrasi pemerintahan, penggunaan bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi tertulis, tetapi juga sebagai representasi profesionalisme, akuntabilitas, dan kredibilitas lembaga pemerintah. Salah satu bentuk komunikasi resmi yang paling sering digunakan oleh instansi pemerintah adalah surat dinas. Surat dinas merupakan dokumen resmi yang memuat informasi, kebijakan, instruksi, maupun keputusan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, penyusunannya harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia baku agar informasi yang disampaikan bersifat jelas, efektif, tidak menimbulkan multitafsir, serta memiliki kekuatan administratif dan hukum (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2021).

Perkembangan tata kelola pemerintahan yang semakin mengedepankan prinsip *good governance* menuntut setiap instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas komunikasi administrasi, termasuk dalam penyusunan surat dinas. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi, mengurangi efektivitas komunikasi organisasi, serta memengaruhi citra institusi di mata masyarakat (Chaer, 2021). Dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penggunaan Tata Bahasa dan Penulisan Surat Dinas yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bersama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2024 ditegaskan bahwa surat dinas merupakan representasi atau citra diri suatu lembaga sehingga ketepatan penggunaan bahasa menjadi salah satu indikator profesionalisme aparatur pemerintah (Perpustakaan Nasional RI, 2024). Selain itu, penyusunan surat dinas yang memenuhi kaidah bahasa Indonesia baku diyakini mampu meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik (Putrayasa, 2022).

Urgensi penggunaan bahasa Indonesia baku dalam surat dinas juga semakin diperkuat dengan diterbitkannya Bahan Penyuluhan Tata Naskah Dinas: Bahasa Indonesia dalam Surat Dinas oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2025. Pedoman tersebut menjelaskan bahwa surat dinas merupakan representasi lembaga

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 25/07/2026; Revised: 01/08/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

sehingga penggunaan bahasa yang baik dan benar menjadi bagian penting dalam membangun kredibilitas organisasi (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025). Pedoman tersebut disusun dengan mengacu pada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas serta berbagai regulasi nasional mengenai tata naskah dinas (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2021). Kehadiran pedoman tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas bahasa dalam administrasi pemerintahan agar setiap dokumen resmi memiliki standar kebahasaan yang seragam, efektif, dan sesuai dengan perkembangan regulasi.

Meskipun berbagai regulasi dan pedoman telah diterbitkan, implementasi penggunaan bahasa Indonesia baku dalam surat menyurat resmi masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan diksi, struktur kalimat, dan sistematika surat masih sering ditemukan pada dokumen resmi yang diterbitkan oleh berbagai instansi (Alwi *et al.,* 2021; Moeliono, 2020). Kesalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kebahasaan, tetapi juga menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi aparatur dalam menyusun dokumen administrasi yang memenuhi standar nasional. Hasil penelitian mengenai analisis penggunaan bahasa Indonesia dalam surat resmi juga memperlihatkan bahwa ketidaksesuaian terhadap kaidah bahasa masih menjadi persoalan yang memerlukan pembinaan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan fungsi penyuntingan sebelum surat diterbitkan (Sari & Hidayat, 2023).

Berbagai penelitian telah mengkaji penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi maupun komunikasi administrasi. Penelitian Azis *et al.,* (2023) menunjukkan bahwa surat sosialisasi penerimaan mahasiswa baru masih mengandung kesalahan pada aspek ejaan dan sintaksis yang disebabkan oleh rendahnya penguasaan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), kurangnya pelatihan penulisan surat resmi, serta pengaruh bahasa daerah terhadap penulis surat. Temuan tersebut menegaskan bahwa kualitas surat dinas tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan menulis, tetapi juga oleh kompetensi kebahasaan aparatur dan budaya organisasi yang mendukung proses penyuntingan dokumen.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Aprilianti *et al.,* (2025) menjelaskan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penyusunan surat menyurat berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi manajemen perkantoran. Ketepatan penggunaan ejaan, pemilihan diksi, dan struktur kalimat yang efektif mampu meningkatkan kejelasan informasi, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan kesalahan komunikasi dalam organisasi. Dengan demikian, kualitas bahasa dalam surat resmi tidak hanya memiliki dimensi linguistik, tetapi juga berdampak pada efektivitas tata kelola administrasi.

Pada lingkup yang lebih luas, kajian mengenai kebijakan bahasa Indonesia juga menunjukkan bahwa implementasi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara memerlukan penguatan kebijakan dan konsistensi penerapan di berbagai institusi. Susanto *et al.,* (2024) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan bahasa tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada implementasi yang konsisten dalam praktik administrasi dan pelayanan publik. Sementara itu, Lukman *et al.,* (2026) menjelaskan bahwa perencanaan bahasa resmi harus diikuti dengan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi berkelanjutan

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 25/07/2026; Revised: 01/08/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

agar penggunaan bahasa Indonesia baku dapat diterapkan secara konsisten dalam berbagai dokumen resmi.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas penggunaan bahasa Indonesia dalam surat dinas, sebagian besar kajian masih berfokus pada identifikasi kesalahan kebahasaan, seperti ejaan, diksi, dan struktur kalimat, atau pada implementasi kebijakan bahasa secara umum. Kajian-kajian tersebut belum banyak menempatkan tata naskah dinas sebagai bagian dari sistem administrasi publik yang berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi birokrasi, kualitas tata kelola pemerintahan, serta profesionalisme aparatur. Padahal, dalam perspektif *public management*, tata naskah dinas merupakan instrumen administratif yang mendukung koordinasi organisasi, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik.

Seiring dengan penguatan reformasi birokrasi dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kebutuhan akan dokumen administrasi yang memenuhi standar kebahasaan dan tata naskah semakin penting. Dokumen resmi yang disusun secara sistematis, menggunakan bahasa Indonesia baku, dan sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas akan meningkatkan kejelasan informasi, meminimalkan kesalahan interpretasi, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mengintegrasikan perspektif kebahasaan dengan administrasi publik untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran tata naskah dinas dalam meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata naskah dinas dan kebijakan kebahasaan dalam meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan daerah melalui sintesis berbagai hasil penelitian, regulasi, dan dokumen ilmiah yang relevan. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat hubungan antara kebijakan kebahasaan dan administrasi publik serta menjadi dasar penyusunan strategi pembinaan kebahasaan, peningkatan kompetensi aparatur, dan penguatan tata kelola administrasi pemerintahan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, mensintesis, dan menginterpretasikan berbagai hasil penelitian serta dokumen ilmiah yang membahas tata naskah dinas, kebijakan kebahasaan, dan administrasi pemerintahan daerah sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran bahasa Indonesia baku dalam meningkatkan kualitas administrasi publik.

Sumber data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, pedoman tata naskah dinas, serta dokumen resmi yang relevan. Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, Garuda, Crossref, DOAJ, Scopus, dan repositori resmi pemerintah. Literatur yang digunakan dipublikasikan pada rentang tahun 2021–2026, sedangkan beberapa referensi yang terbit sebelum tahun tersebut tetap digunakan sebagai landasan konseptual karena memiliki relevansi yang kuat terhadap topik penelitian.

Kriteria inklusi literatur meliputi: (1) membahas tata naskah dinas, kebijakan kebahasaan, bahasa Indonesia baku, atau administrasi pemerintahan; (2) dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, buku akademik, atau dokumen resmi yang memiliki kredibilitas; (3)

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 25/07/2026; Revised: 01/08/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan penelitian; dan (4) tersedia dalam teks lengkap (*full text*). Adapun kriteria eksklusi meliputi: (1) artikel yang tidak membahas administrasi pemerintahan atau tata naskah dinas; (2) publikasi yang tidak melalui proses ilmiah atau tidak memiliki sumber yang jelas; (3) artikel duplikat; serta (4) publikasi yang hanya memuat abstrak tanpa naskah lengkap.

Berdasarkan proses seleksi tersebut, penelitian ini menelaah sebanyak 35 literatur yang memenuhi kriteria inklusi dan relevan dengan fokus penelitian. Literatur tersebut terdiri atas artikel jurnal, buku ilmiah, regulasi pemerintah, dan pedoman resmi mengenai tata naskah dinas serta penggunaan bahasa Indonesia dalam administrasi pemerintahan.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Tahapan analisis meliputi: (1) identifikasi dan seleksi literatur; (2) pengelompokan informasi berdasarkan tema, yaitu tata naskah dinas, kebijakan kebahasaan, penggunaan bahasa Indonesia baku, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi, dan implikasinya terhadap administrasi pemerintahan; (3) reduksi data untuk memilih informasi yang paling relevan; (4) penyajian hasil secara deskriptif; dan (5) penyusunan sintesis guna mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta kontribusi konseptual yang diperoleh dari berbagai sumber.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang berasal dari artikel ilmiah, buku referensi, regulasi pemerintah, dan dokumen resmi. Selain itu, setiap sumber dievaluasi berdasarkan kredibilitas penerbit, reputasi jurnal, relevansi terhadap topik penelitian, serta keterbaruan publikasi sehingga hasil sintesis memiliki validitas akademik yang memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Bahasa Indonesia Baku dalam Surat Menyurat Resmi Pemerintah Daerah

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia baku dalam surat menyurat resmi pemerintah daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan administrasi pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel. Surat dinas tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi formal, tetapi juga sebagai dokumen administratif yang memiliki kekuatan hukum dan menjadi representasi kredibilitas suatu instansi pemerintah. Oleh karena itu, penyusunannya harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, mencakup ketepatan ejaan, pemilihan diksi, struktur kalimat, serta konsistensi penggunaan istilah sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022; Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2023).

Penggunaan bahasa yang baku dalam dokumen resmi bertujuan untuk menghasilkan komunikasi yang jelas, efektif, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dalam administrasi publik, kualitas bahasa memengaruhi ketepatan penyampaian informasi, proses pengambilan keputusan, serta koordinasi antarsatuan kerja. Bahasa yang sederhana, lugas, dan sistematis juga merupakan bagian dari prinsip *plain language* yang telah banyak diterapkan dalam komunikasi pemerintahan di berbagai negara untuk meningkatkan keterbacaan dokumen dan kualitas pelayanan publik (Kimble, 1996; Redish, 2012; Schriver, 2017).

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 25/07/2026; Revised: 01/08/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

Penelitian Sumadi (2020) menunjukkan bahwa berbagai surat dinas, laporan, dan papan nama ruang pada badan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta masih mengandung kesalahan kebahasaan, terutama pada aspek diksi. Kesalahan tersebut meliputi penggunaan istilah asing yang telah memiliki padanan dalam bahasa Indonesia, penggunaan kata daerah dalam dokumen resmi, serta pemilihan bentuk kata yang tidak sesuai dengan kaidah pembentukan kata bahasa Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia baku dalam administrasi pemerintahan belum sepenuhnya konsisten meskipun pedoman kebahasaan telah tersedia.

Selain kesalahan diksi, ketidaktepatan penggunaan ejaan juga masih menjadi persoalan yang sering ditemukan dalam surat dinas. Kesalahan penulisan huruf kapital, tanda baca, kata depan, singkatan, maupun unsur serapan berpotensi mengurangi kejelasan informasi dan bahkan mengubah makna suatu pesan. Oleh karena itu, penguasaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah dalam menyusun dokumen resmi agar tercipta komunikasi administrasi yang efektif dan seragam (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022).

Kualitas surat dinas juga dipengaruhi oleh kemampuan penyusun dalam membangun kalimat yang efektif. Kalimat yang ringkas, logis, dan mudah dipahami akan mempercepat proses komunikasi birokrasi, sedangkan kalimat yang panjang, berbelit-belit, dan ambigu dapat menghambat proses administrasi karena memerlukan interpretasi tambahan dari penerima surat. Dalam perspektif komunikasi pemerintahan, penggunaan bahasa yang jelas merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik melalui dokumen administrasi yang mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan (Redish, 2012; Schriver, 2017).

Lebih lanjut, penggunaan bahasa Indonesia baku dalam surat dinas juga berkontribusi terhadap pembentukan citra profesional lembaga pemerintah. Dokumen yang disusun secara sistematis, konsisten, dan sesuai dengan kaidah bahasa menunjukkan tingkat kompetensi organisasi dalam mengelola administrasi publik. Sebaliknya, kesalahan bahasa yang berulang dapat menurunkan kredibilitas lembaga serta mengurangi efektivitas komunikasi birokrasi. Oleh sebab itu, pembinaan kebahasaan, pelatihan penulisan surat dinas, serta pengawasan terhadap implementasi tata naskah dinas perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2023).

Berdasarkan sintesis berbagai referensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia baku dalam surat menyurat resmi pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek linguistik, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam meningkatkan efektivitas komunikasi administrasi, kualitas pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah akan menghasilkan dokumen yang lebih jelas, mudah dipahami, serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Tabel 1. Tipologi Penyimpangan Bahasa dalam Tata Naskah Dinas dan Dampaknya terhadap Administrasi Pemerintahan

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 25/07/2026; Revised: 01/08/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

Jenis Penyimpangan	Bentuk Penyimpangan	Dampak terhadap Administrasi Pemerintahan
Ejaan	Kesalahan huruf kapital, tanda baca, penulisan kata depan, dan singkatan	Menurunkan kejelasan informasi serta berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi dalam komunikasi birokrasi.
Diksi	Penggunaan istilah asing yang telah memiliki padanan bahasa Indonesia atau pemilihan kata yang tidak tepat	Mengurangi konsistensi dokumen resmi dan menyulitkan pemahaman aparatur maupun masyarakat.
Struktur Kalimat	Kalimat terlalu panjang, ambigu, dan tidak efektif	Menghambat proses disposisi, koordinasi, serta pengambilan keputusan administrasi.
Format Tata Naskah Dinas	Ketidaksesuaian sistematika, format surat, dan penggunaan komponen naskah dinas	Menurunkan keseragaman administrasi, mengurangi profesionalisme organisasi, serta menyulitkan pengelolaan arsip dan dokumen elektronik.

Sumber: Hasil sintesis penulis berdasarkan berbagai literatur (2021–2026).

B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penggunaan Bahasa Indonesia Baku dalam Surat Menyurat Resmi Pemerintah Daerah

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa implementasi tata naskah dinas dan kebijakan kebahasaan dalam administrasi pemerintahan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik pada tingkat individu maupun kelembagaan. Keberhasilan penerapan bahasa Indonesia baku dalam dokumen resmi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia, budaya organisasi, sistem pengendalian dokumen, serta dukungan teknologi administrasi. Dengan demikian, kualitas tata naskah dinas merupakan hasil interaksi antara aspek regulatif, kompetensi aparatur, dan tata kelola organisasi.

Faktor pertama adalah kompetensi kebahasaan aparatur. Aparatur yang memiliki pemahaman yang baik mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), tata naskah dinas, dan teknik penulisan administrasi cenderung menghasilkan dokumen resmi yang lebih sistematis dan sesuai standar. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi menyebabkan kesalahan ejaan, pemilihan diksi, serta penyusunan kalimat yang kurang efektif sehingga mengurangi kualitas dokumen administrasi.

Faktor kedua adalah implementasi regulasi dan standar tata naskah dinas. Berbagai regulasi, seperti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Naskah Dinas, telah memberikan pedoman yang jelas dalam penyusunan dokumen resmi. Namun, tingkat kepatuhan terhadap regulasi tersebut masih bergantung pada komitmen masing-masing organisasi dalam menerapkan standar secara konsisten melalui prosedur operasional dan mekanisme pengawasan internal.

Faktor ketiga adalah pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur. Program pelatihan penulisan naskah dinas, pendampingan kebahasaan, serta pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan terbukti meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyusun dokumen resmi. Pelatihan tidak hanya memperkuat pemahaman terhadap kaidah

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 25/07/2026; Revised: 01/08/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

bahasa Indonesia baku, tetapi juga meningkatkan kemampuan menyusun dokumen administrasi yang efektif, efisien, dan sesuai ketentuan.

Faktor keempat adalah mekanisme penyuntingan dan pengendalian mutu dokumen. Organisasi yang menerapkan proses pemeriksaan naskah sebelum surat diterbitkan cenderung menghasilkan dokumen dengan kualitas yang lebih baik. Penyuntingan berfungsi sebagai pengendalian mutu untuk memastikan ketepatan ejaan, konsistensi istilah, kesesuaian format, serta kelengkapan unsur tata naskah dinas sebelum dokumen digunakan dalam proses administrasi.

Faktor kelima adalah budaya organisasi. Budaya kerja yang menekankan profesionalisme, ketelitian, dan kepatuhan terhadap prosedur mendorong aparatur untuk lebih konsisten dalam menerapkan tata naskah dinas. Sebaliknya, organisasi yang lebih berorientasi pada kecepatan penyelesaian pekerjaan tanpa mekanisme evaluasi dokumen cenderung menghasilkan surat dinas yang kurang memenuhi standar administrasi.

Faktor keenam adalah pemanfaatan teknologi informasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Implementasi SPBE, termasuk penggunaan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) dan berbagai platform E-Office, mendorong standardisasi format tata naskah dinas, mempercepat proses disposisi, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen. Penggunaan templat digital dan sistem pengarsipan elektronik membantu meningkatkan konsistensi administrasi. Namun demikian, teknologi belum sepenuhnya menjamin kualitas kebahasaan karena ketepatan penggunaan bahasa Indonesia baku tetap bergantung pada kompetensi aparatur dalam menyusun dokumen. Oleh karena itu, transformasi digital perlu diikuti dengan penguatan literasi kebahasaan agar implementasi SPBE tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga kualitas tata naskah dinas.

Berdasarkan sintesis berbagai literatur, implementasi tata naskah dinas dan kebijakan kebahasaan dipengaruhi oleh enam faktor utama, yaitu kompetensi aparatur, penerapan regulasi, pelatihan, mekanisme penyuntingan, budaya organisasi, dan dukungan teknologi informasi. Keenam faktor tersebut saling melengkapi dalam membentuk sistem administrasi pemerintahan yang mampu menghasilkan dokumen resmi yang memenuhi standar tata naskah dinas serta mendukung penyelenggaraan administrasi publik yang efektif.

C. Implikasi Penggunaan Bahasa Indonesia Baku terhadap Administrasi Pemerintahan

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia baku dalam surat menyurat resmi pemerintah daerah memiliki implikasi yang luas terhadap kualitas administrasi pemerintahan. Bahasa dalam dokumen resmi bukan hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung efektivitas koordinasi birokrasi, transparansi kebijakan, akuntabilitas pelayanan publik, serta pembentukan citra kelembagaan pemerintah. Dokumen administrasi yang menggunakan bahasa yang jelas, tepat, dan sistematis akan mempermudah proses komunikasi antarunit kerja serta mengurangi potensi kesalahan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022).

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 25/07/2026; Revised: 01/08/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

Implikasi pertama terlihat pada peningkatan efektivitas komunikasi birokrasi. Dalam lingkungan pemerintahan, surat dinas menjadi sarana utama untuk menyampaikan kebijakan, instruksi, laporan, dan keputusan administratif. Penggunaan bahasa yang baku dan efektif memungkinkan pesan yang disampaikan dapat dipahami secara seragam oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemerintahan. Sebaliknya, penggunaan bahasa yang tidak tepat dapat menyebabkan perbedaan interpretasi, keterlambatan tindak lanjut, bahkan kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Mergel *et al.,* (2021), kualitas komunikasi organisasi publik menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan transformasi administrasi karena memengaruhi bagaimana informasi diproses dan diterapkan oleh aparatur.

Implikasi kedua berkaitan dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dokumen resmi pemerintah merupakan salah satu bentuk informasi publik yang menjadi dasar hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan tidak ambigu akan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan serta mendukung prinsip keterbukaan publik. Konsep *plain language* dalam komunikasi pemerintah menekankan bahwa dokumen resmi harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pembaca, menggunakan struktur yang logis, dan menghindari penggunaan istilah yang sulit dipahami tanpa penjelasan (Redish, 2012; Schriver, 2017). Dengan demikian, penggunaan bahasa baku tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan linguistik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih responsif.

Implikasi ketiga adalah peningkatan efisiensi proses administrasi pemerintahan. Surat dinas yang menggunakan struktur bahasa yang baik dapat mempercepat proses disposisi, pengambilan keputusan, dan koordinasi antarorganisasi. Dokumen yang jelas akan mengurangi kebutuhan klarifikasi tambahan karena informasi yang disampaikan telah memenuhi unsur ketepatan dan kelengkapan. Dalam perspektif administrasi publik, efisiensi komunikasi merupakan bagian dari peningkatan kinerja organisasi karena mengurangi hambatan dalam aliran informasi dan mempercepat penyelesaian pekerjaan (Mergel *et al.,* 2021).

Selain itu, penerapan bahasa Indonesia baku juga memberikan implikasi terhadap profesionalisme dan citra institusi pemerintah. Surat resmi yang disusun dengan memperhatikan kaidah bahasa menunjukkan bahwa organisasi memiliki standar kerja, ketelitian, dan komitmen terhadap kualitas pelayanan. Sebaliknya, kesalahan bahasa yang berulang dalam dokumen resmi dapat memberikan persepsi negatif terhadap profesionalitas lembaga. Sumadi (2020) menunjukkan bahwa masih ditemukannya kesalahan bahasa pada dokumen badan publik menunjukkan perlunya peningkatan perhatian terhadap aspek kebahasaan sebagai bagian dari kualitas administrasi pemerintahan.

Implikasi berikutnya adalah pentingnya penguatan kapasitas aparatur pemerintah.

Penggunaan bahasa Indonesia baku tidak dapat hanya bergantung pada regulasi, tetapi harus didukung oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, pembinaan, dan evaluasi berkala. Aparatur pemerintah perlu memiliki kemampuan menyusun dokumen yang tidak hanya sesuai dengan format administratif, tetapi juga memenuhi prinsip komunikasi yang efektif. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2024) menegaskan bahwa pembinaan penggunaan bahasa Indonesia dalam ranah

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 25/07/2026; Revised: 01/08/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

pemerintahan merupakan bagian dari upaya memperkuat fungsi bahasa negara dan meningkatkan kualitas komunikasi publik.

Dalam konteks perkembangan pemerintahan digital, penggunaan bahasa Indonesia baku juga memiliki peran strategis dalam mendukung digitalisasi administrasi pemerintahan. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) membutuhkan dokumen digital yang memiliki standar bahasa dan format yang konsisten agar dapat diproses secara efektif oleh manusia maupun sistem teknologi. Oleh karena itu, transformasi digital dalam pemerintahan perlu disertai dengan penguatan standar kebahasaan dalam setiap dokumen elektronik yang dihasilkan oleh instansi pemerintah (Mergel *et al.,* 2021).

Transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak hanya mengubah media penyampaian surat dinas dari bentuk konvensional menjadi elektronik, tetapi juga mendorong standardisasi tata naskah dinas pada seluruh instansi pemerintah. Implementasi aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dan tata naskah dinas memungkinkan penyusunan, pengiriman, disposisi, hingga pengarsipan surat dilakukan secara digital dengan format yang lebih seragam. Standarisasi tersebut berpotensi meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap ketentuan tata naskah dinas, meskipun kualitas bahasa yang digunakan tetap bergantung pada kompetensi kebahasaan penyusun dokumen.

Di sisi lain, digitalisasi administrasi melalui aplikasi E-Office dan SRIKANDI juga membuka peluang integrasi fitur pemeriksaan bahasa (*language checking*), templat naskah dinas, serta validasi format dokumen sebelum surat diterbitkan. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian mutu dokumen resmi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi SPBE perlu didukung oleh peningkatan literasi digital dan literasi kebahasaan aparatur agar tata naskah dinas yang dihasilkan memenuhi standar administrasi pemerintahan dan kaidah bahasa Indonesia baku

Berdasarkan hasil sintesis berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia baku dalam surat menyurat resmi pemerintah daerah memiliki implikasi strategis terhadap peningkatan kualitas administrasi publik. Bahasa baku berperan dalam memperkuat efektivitas komunikasi birokrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mempercepat proses administrasi, membangun citra profesional lembaga, serta mendukung transformasi digital pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi perlu menjadi bagian integral dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Pembahasan

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa tata naskah dinas dan kebijakan kebahasaan merupakan bagian integral dari tata kelola administrasi publik. Dalam perspektif *public management*, dokumen administrasi bukan sekadar media komunikasi formal, tetapi juga instrumen yang mendukung koordinasi organisasi, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kualitas tata naskah dinas tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap kaidah bahasa Indonesia baku, tetapi juga oleh

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 25/07/2026; Revised: 01/08/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

kemampuan organisasi dalam membangun sistem administrasi yang terstandar dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa implementasi tata naskah dinas dipengaruhi oleh enam faktor utama, yaitu kompetensi kebahasaan aparatur, penerapan regulasi, pelatihan, mekanisme penyuntingan dokumen, budaya organisasi, dan dukungan teknologi informasi. Keenam faktor tersebut saling berkaitan sehingga peningkatan kualitas administrasi tidak dapat dicapai hanya melalui penyusunan regulasi. Penguatan kapasitas aparatur, pengawasan internal, dan pembinaan kebahasaan yang berkelanjutan menjadi prasyarat agar standar tata naskah dinas dapat diterapkan secara konsisten di lingkungan pemerintahan daerah.

Dalam konteks reformasi birokrasi, transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen administrasi. Implementasi aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) dan berbagai platform E-Office telah mendorong standardisasi format surat dinas, mempercepat proses disposisi, memperkuat pengelolaan arsip elektronik, serta meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi. Namun demikian, digitalisasi administrasi tidak secara otomatis menjamin kualitas bahasa dalam dokumen resmi. Ketepatan penggunaan ejaan, pemilihan diksi, serta penyusunan kalimat tetap bergantung pada kompetensi aparatur. Oleh karena itu, pengembangan SPBE perlu diintegrasikan dengan pembinaan kebahasaan, penyediaan templat tata naskah dinas yang baku, serta fitur pemeriksaan bahasa pada aplikasi administrasi elektronik.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa tata naskah dinas memiliki implikasi yang lebih luas terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Dokumen resmi yang disusun secara sistematis, menggunakan bahasa Indonesia baku, dan mengikuti ketentuan tata naskah dinas akan mengurangi potensi kesalahan interpretasi, memperlancar koordinasi antarsatuan kerja, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Sebaliknya, penyimpangan dalam penggunaan bahasa maupun format administrasi dapat menghambat efektivitas komunikasi birokrasi dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian mengenai tata naskah dinas dengan mengintegrasikan perspektif kebahasaan dan administrasi publik. Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang berfokus pada identifikasi kesalahan ejaan, diksi, atau struktur kalimat, kajian ini menempatkan tata naskah dinas sebagai instrumen tata kelola administrasi yang mendukung efektivitas organisasi sektor publik. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kebahasaan memiliki peran strategis dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif terhadap transformasi digital, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan hasil sintesis tersebut, peningkatan kualitas tata naskah dinas memerlukan strategi yang bersifat komprehensif, meliputi penguatan regulasi internal, peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan yang berkelanjutan, optimalisasi mekanisme penyuntingan dokumen, serta pemanfaatan teknologi administrasi berbasis SPBE. Integrasi antara kebijakan kebahasaan, tata naskah dinas, dan transformasi digital diharapkan mampu memperkuat efektivitas administrasi pemerintahan daerah sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 25/07/2026; Revised: 01/08/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

SIMPULAN

Berdasarkan hasil sintesis literatur, dapat disimpulkan bahwa tata naskah dinas dan kebijakan kebahasaan berperan penting dalam meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan daerah. Penggunaan bahasa Indonesia baku dalam dokumen resmi tidak hanya memenuhi kaidah kebahasaan, tetapi juga meningkatkan efektivitas komunikasi birokrasi, konsistensi administrasi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola pemerintahan.

Implementasi tata naskah dinas dipengaruhi oleh kompetensi aparatur, regulasi, pelatihan, mekanisme penyuntingan, budaya organisasi, dan pemanfaatan teknologi melalui SPBE. Integrasi faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa tata naskah dinas merupakan instrumen penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilianti, A., Ramadhani, A. D., Mulyadi, A., Erlangga, A., Dealova, D., & Rizkyanfi, M. W. (2025). Analisis penggunaan bahasa Indonesia dalam penyusunan surat menyurat dan dampak terhadap efisiensi manajemen perkantoran. *Indonesian Multidisciplinary Economy and Business Journal*. https://ejournal.indo-intellectual.id/index.php/imeij/article/view/3052

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas*. https://jdih.anri.go.id

Azis, A. R., & Abduh, N. K. (2023). Analysis of Indonesian language errors in a technical socialization letter. *IDEAS: Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature*. https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/ideas/article/view/3663

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2022). *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Edisi V)*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *Pengutamaan bahasa Indonesia dalam naskah dinas*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025). *Bahan penyuluhan tata naskah dinas: Bahasa Indonesia dalam surat dinas*. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. https://repositori.kemendikdasmen.go.id/34965/

Karenisa, K., Nova, I. F., Hapsari, H. A., Retnoningsih, D., & Sari, S. T. (2025). *Bahan penyuluhan tata naskah dinas: Bahasa Indonesia dalam surat dinas*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. https://repositori.kemendikdasmen.go.id/34965/

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 25/07/2026; Revised: 01/08/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah*.

Kimble, J. (1996). Writing for dollars, writing to please: The case for plain language in business, government, and law. *The Scribes Journal of Legal Writing, 6*, 1–22.

Lukman, F., Nasrullah, R., Nugraha, T. C., Nur, T., Suganda, D., & Abdel Rahim, E.-S. A. (2026). Official language planning in Indonesia: Revisiting conflict, policy formation, and implications for language education. *International Journal of Language Education*. https://ojs.unm.ac.id/ijole/article/view/87756

Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2021). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly, 36*(4), 101385. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2024). *Bimbingan teknis penggunaan tata bahasa dan penulisan surat dinas*. https://www.perpusnas.go.id/berita/perpusnas-gelar-bimtek-penggunaan-tata-bahasa-dan-penulisan-surat-dinas

Redish, J. (2012). *Letting go of the words: Writing web content that works* (2nd ed.). Morgan Kaufmann.

Schriver, K. A. (2017). *Plain language in the US gains momentum: 1940–2015*. IEEE Transactions on Professional Communication, 60(4), 343–383.

Sumadi. (2020). Diksi bahasa Indonesia dalam surat dinas, laporan, dan papan nama ruang pada badan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Widyaparwa, 48*(2), 206–218. https://doi.org/10.26499/wdprw.v48i2.511

Susanto, G., Pickus, D., Suparmi, Rusiandie, A., & Noviya, H. (2024). Indonesian language policy and perspectives on its implementation in promoting Bahasa Indonesia as an international language. *Cogent Education, 11*(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2364511

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.